

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, hasil penelitian ini berhasil menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa disabilitas signifikan mempengaruhi status kemiskinan rumah tangga, bahkan setelah dikontrol oleh variabel-variabel seperti jenis kelamin, usia, capaian pendidikan, status kerja, status perkawinan, domisili tempat tinggal, dan jumlah anggota rumah tangga. Secara statistik, rumah tangga yang dikepalai oleh individu dengan disabilitas berpeluang untuk berada dalam kondisi miskin dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai oleh individu bukan disabilitas.
2. Faktor-faktor penentu yang signifikan memengaruhi status kemiskinan rumah tangga dengan kepala rumah tangga penyandang disabilitas adalah jenis disabilitas yang dialami oleh kepala rumah tangga (gangguan penglihatan, gangguan pendengaran dan atau berkomunikasi, serta gangguan mengurus diri), tingkat keparahan disabilitas, jenis kelamin, capaian pendidikan, status perkawinan, domisili tempat tinggal, dan jumlah anggota rumah tangga. Dari faktor-faktor tersebut, diperoleh karakteristik kepala rumah tangga penyandang disabilitas yang rentan terhadap kemiskinan, yakni kepala rumah tangga dengan gangguan penglihatan, gangguan pendengaran dan atau berkomunikasi, gangguan mengurus diri, mengalami disabilitas yang berat atau parah, jenis kelamin perempuan, capaian pendidikan yang rendah, menikah, berdomisili di perdesaan, dan memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak. Gambaran karakteristik tersebut dapat dijadikan acuan dalam kebijakan pengentasan kemiskinan yang efektif dan tentunya tepat sasaran.

5.2 Implikasi Penelitian

Dari hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa disabilitas berpengaruh signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penentu yang mempengaruhi kemiskinan rumah tangga dengan kepala rumah tangga penyandang disabilitas. Dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah seharusnya memberikan perlakuan yang berbeda antara penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas karena kondisi khusus yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Dari bukti empiris yang disajikan dan dijabarkan dalam penelitian ini, beberapa implikasi dan kebijakan terkait disabilitas dan kemiskinan yang direkomendasikan antara lain:

1. Memperhatikan bahwa jenis disabilitas juga merupakan determinan penting dalam status kemiskinan rumah tangga penyandang disabilitas, maka pemerintah perlu mendorong pengembangan program pelatihan kerja di sektor informal dan pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan individu penyandang disabilitas berdasarkan jenis disabilitas yang dialaminya. Dalam hal ini, pendekatan berbasis jenis disabilitas juga sangat penting untuk diterapkan, terlebih ketika disabilitas yang dialami pada tingkat berat. Sebagai contoh, bagi individu dengan gangguan pendengaran atau komunikasi memiliki peluang kerja di sektor informal, seperti menjadi tukang jahit atau konveksi rumahan, membuat kerajinan tangan (pengrajin). Selain itu, bagi individu dengan gangguan penglihatan juga memiliki peluang kerja di sektor informal seperti menjadi tukang pijat dan berkarya di bidang musik. Maka dari itu, pemerintah perlu membuka pelatihan keterampilan kerja di sektor informal tersebut yang diakomodasikan khusus bagi penyandang disabilitas mengingat banyaknya kepala rumah tangga penyandang disabilitas yang bekerja di sektor informal. Dengan adanya pelatihan dan keterampilan khusus akan mendukung produktivitas penyandang disabilitas tersebut. Demikian pula bagi individu dengan gangguan mengurus diri, perlu diberikan pendampingan khusus dalam pelatihan dan pemberdayaan ekonomi, agar potensi mereka tetap dapat dimaksimalkan secara produktif.

2. Di sisi lain, mengingat bahwa jenis kelamin dan status perkawinan berkontribusi signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga penyandang disabilitas, maka kebijakan penanggulangan kemiskinan juga harus memperhatikan dimensi gender dan kondisi sosial individu penyandang disabilitas. Perempuan penyandang disabilitas yang menjadi kepala rumah tangga atau tidak memiliki pasangan cenderung menghadapi beban ganda dalam menjalani peran ekonomi dan sosialnya. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu memberikan perhatian khusus terhadap rumah tangga penyandang disabilitas yang dikepalai oleh perempuan melalui kebijakan yang mencakup peningkatan akses pendidikan, pelatihan kerja, perlindungan sosial, serta dukungan ekonomi yang memungkinkan perempuan penyandang disabilitas menjadi mandiri secara finansial.
3. Pemerintah juga perlu memperhatikan aspek lokasi geografis atau domisili tempat tinggal, karena disparitas antara wilayah perkotaan dan perdesaan menjadi salah satu faktor yang memperbesar ketimpangan kesejahteraan. Oleh karena itu, pemerataan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, serta infrastruktur yang ramah disabilitas harus menjadi prioritas dalam pembangunan daerah, terutama di wilayah-wilayah yang masih tertinggal. Selain itu, bisa dipertimbangkan untuk membuat model pilot desa inklusi disabilitas dengan mengoptimalkan penggunaan dana dari Program Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas. Pencapaian tujuan ini memerlukan pendamping yang membantu pemerintah desa dan adanya *local champion* yang menjadi penggerak dalam tingkat masyarakat.
4. Jumlah anggota rumah tangga juga ditemukan berpengaruh terhadap kemungkinan rumah tangga berada dalam kondisi miskin. Pemerintah perlu mendorong penguatan sistem perlindungan sosial yang bersifat *targeted* bagi rumah tangga dengan kepala rumah tangga penyandang disabilitas dan anggota rumah tangga yang besar.

5. Penyediaan bantuan khusus seperti subsidi alat bantu disabilitas, layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan mudah diakses, serta program pelatihan keterampilan kerja yang inklusif menjadi penting untuk mengurangi *the earning handicap* yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Lebih lanjut, kebijakan untuk membuka peluang kerja atau wirausaha yang ramah disabilitas juga perlu diperluas dengan dukungan modal dan pendampingan yang sesuai dengan kondisi mereka. Pemerintah daerah juga dapat dilibatkan lebih aktif dalam mendata dan memfasilitasi kebutuhan spesifik rumah tangga penyandang disabilitas, mengingat konteks lokal turut memengaruhi efektivitas intervensi kebijakan. Dengan kebijakan yang mengacu pada kerentanan akibat *the conversion handicap* dan *the earning handicap*, serta memperhitungkan beban rumah tangga yang tinggi, intervensi pemerintah diharapkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu memberdayakan rumah tangga penyandang disabilitas untuk keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak luput dari berbagai keterbatasan, baik dalam proses maupun hasil dari penelitian ini. Oleh karena itu, keterbatasan dalam penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai landasan atau acuan untuk penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Penelitian ini masih sebatas pada analisis untuk kepala rumah tangga, belum menyertakan jumlah penyandang disabilitas dalam suatu rumah tangga yang dikepalai oleh penyandang disabilitas sebagai faktor internal dalam determinan kemiskinan rumah tangga dengan kepala rumah tangga penyandang disabilitas.
2. Penentuan status kemiskinan rumah tangga sebagai variabel dependen dalam penelitian ini masih sederhana dan hanya mengikuti standar yang ditetapkan oleh BPS berdasarkan garis kemiskinan nasional yang dilihat dari pengeluaran per kapita.

5.4 Saran

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat peneliti berikan antara lain:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengikutsertakan variabel internal yang berpotensi memengaruhi kemiskinan rumah tangga dengan kepala rumah tangga penyandang disabilitas, seperti jumlah penyandang disabilitas dalam suatu rumah tangga juga perlu diperhatikan, karena dapat memengaruhi beban ekonomi dan tingkat kesejahteraan rumah tangga secara keseluruhan.
2. Untuk mengukur status kemiskinan, akan lebih baik jika penelitian berikutnya tidak hanya bergantung pada garis kemiskinan nasional dengan aspek moneter yang berbasis pengeluaran per kapita. Alternatif lain yang dapat digunakan antara lain adalah *Multidimensional Poverty Index (MPI)*, atau ukuran kemiskinan rumah tangga penyandang disabilitas yang juga mempertimbangkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kualitas tempat tinggal, dan standar hidup. Dengan demikian, penelitian akan mampu menangkap kompleksitas kemiskinan rumah tangga penyandang disabilitas secara lebih luas dan mendalam.

